

Kampanye Akbar, Wapres Ma'ruf Minta Jangan Ada yang Berbuat Anarkis

JAKARTA (IM) – Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta semua pihak terkait mulai dari penyelenggara, petugas keamanan, masyarakat, hingga para kontestan Pemilu, mematuhi pakta integritas mengenai upaya mewujudkan Pemilu damai dan riang gembira yang telah disepakati pada pelaksanaan kampanye akbar.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 78 Tahun 2024, kampanye akbar mulai digelar pada Minggu (21/1) hingga hingga 7 Februari 2024.

"Saya harap, kita kan sudah sama-sama punya kesepakatan, pakta integritas, bahwa semua akan berjalan dengan damai, dengan riang gembira di dalam berkontestasi," ujar Ma'ruf Amin, dikutip dalam keterangannya, Minggu (21/1).

Ma'ruf Amin juga

mengingatkan khususnya kepada para kontestan yang akan mengerahkan massa dalam jumlah besar dalam kampanye akbar, agar mempersiapkan penjagaan massanya secara maksimal. Hal ini untuk menghindari adanya berbagai tindakan anarkis yang dapat memicu kerusuhan.

"Karena memang ini akan mulai mengerahkan massa, saya kira memang perlu ada kesiapan masing-masing untuk menjaga massanya. Jangan sampai ada keributan, jangan sampai ada saling mengejek," ujarnya.

"Itu bisa saja kan, mereka yang sedang mengadakan (kampanye) dicegat oleh mereka (massa) lain, sehingga terjadi konflik," katanya.

Wapres kembali mengajak seluruh pihak terkait untuk terus memberikan pengertian dan mendukung masyarakat agar tertib saat berkampanye. ● mei

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



KAMPANYE TERBUKA PERDANA CAPRES GANJAR

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berorasi saat kampanye terbuka perdana bertajuk Hajatan Rakyat di Lapangan Tegalega, Bandung, Jabar, Minggu (21/1). Hajatan Rakyat yang merupakan singkatan dari harapan jutaan rakyat itu mengusung konsep serakyat seperti sosok Ganjar yang sederhana dan dekat dengan rakyat.

Pungli di Rutan KPK: Selundupkan HP Bayar Rp10 Juta Hingga Rp20 Juta

Di antara pegawai rutan KPK yang memfasilitasi tahanan terdapat sosok yang berperan sebagai koordinator.

JAKARTA (IM) - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menyebut tahanan kasus rasuah yang ingin menyelundupkan ponsel ke dalam rumah tahanan (Rutan) harus membayar Rp 10 juta sampai Rp 20 juta.

Anggota Dewas KPK Albertina Ho mengatakan, pembayaran itu hanya dilakukan satu kali selama tahanan KPK menggunakan ponsel di rutan. Temuan ini merupakan salah satu fakta dalam perkara dugaan pungutan liar (pungli) di Rutan KPK.

"Sekitar berapa ya, Rp 10 juta-Rp 20 juta, selama dia

mempgunakan HP itu kan. Tapi nanti kan ada bulanan yang dibayarkan," ujar Albertina kepada para wartawan, Jumat (19/1) lalu.

Sementara itu, setiap mengisi daya atau mengcas HP dan powerbank, tahanan KPK harus membayar Rp 200.000 sampai Rp 300.000. Menurut Albertina, di antara pegawai rutan KPK yang memfasilitasi tahanan itu terdapat sosok yang berperan sebagai koordinator.

"Jadi mereka itu kan ada koordinatornya juga," kata Albertina.

Sebagai informasi, Dewas KPK sudah mulai menyidan-

gkan perkara dugaan pelanggaran etik 93 pegawai KPK. Dewas mengelompokkan mereka ke dalam tujuh berkas perkara berbeda berdasarkan pasal yang disangkakan.

Sebanyak enam kelompok masing-masing terdiri dari tujuh pegawai. Sementara, satu kelompok lainnya terdiri dari tiga pegawai yang berlatar belakang kepala rutan, mantan kepala rutan, dan komandan.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, sidang etik yang digelar Dewas merupakan komitmen menjaga marwah kelembagaan. Pimpinan KPK menghormati sidang proses penegakan dugaan pelanggaran etik yang sedang bergulir.

"Dalam sidang etik nanti Dewas pastinya akan memutus dugaan pelanggaran

ini secara independen, sebagaimana tugas dan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang (UU) 19 Tahun 2019," kata Ali, Kamis (18/1).

Ali mengatakan, Kedepujian bidang Penindakan dan Eksekusi KPK saat ini juga tengah mengusut dugaan pungli dari sisi pidana. Selain itu, Inspektorat KPK juga mengusut dugaan pelanggaran disiplin pegawai yang diduga terlibat dalam pungli itu.

"Penanganan pelanggaran internal melalui penegakan etik, dugaan tindak pidana, penegakan disiplin, serta perbaikan tata kelola merupakan wujud komitmen kelembagaan KPK dalam menerapkan zero tolerance terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi," ujar Ali.

Sebagai informasi, dugaan

pungli ini ditemukan Dewas KPK sendiri pada tahun lalu. Saat itu, mereka menemukan dugaan pungli itu terjadi sejak 2020 sampai 2023 dengan nilai Rp 4 miliar.

Sejak 2018 Pungli itu menyangkut penyelundupan makanan hingga ponsel. Dewas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap 169 orang saksi, termasuk tahanan KPK. Mereka menyatakan telah mengantongi bukti dan menemukan uang dalam pungli itu mencapai sekitar Rp 6,148 miliar.

Perkara dugaan pelanggaran etik ini diusut oleh Dewas KPK. Sementara, Kedepujian Penindakan dan Eksekusi mengusut dugaan pidana. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK juga mengusut dugaan pelanggaran disiplin. ● han

Ganjar-Mahfud Siap Bila Konflik Wadas Dibahas dalam Debat Pilpres 2024

JAKARTA (IM) - Pasangan capres dan cawapres nomor urut 3 di Pilpres 2024, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, menyatakan siap bila konflik Wadas menjadi bahasan di debat keempat Pilpres 2024, Minggu (21/1/2024).

"Sebaiknya dibahas. Ini akan jadi ajang klarifikasi," kata Ganjar.

Konflik Wadas terkait pembangunan Bendungan Bener di Purworejo sering dikaitkan dengan Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2023. Dia pun mengaku sering menjadi kambing hitam dalam kasus ini.

Ganjar menyebut bahwa program pembangunan Bendungan Bener yang memerlukan pasokan material dari penambangan batu di Wadas bukan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

"Proyek yang menjadi akar persoalan merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo," tegas Ganjar.

Bendungan Bener merupakan satu dari 48 proyek bendungan dalam daftar 201 PSN berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020.

Ganjar memastikan konflik terkait penambangan batu andesit di Wadas untuk keperluan pembangunan Bendungan Bener di Purworejo sudah tuntas.

"Saya selesaikan meskipun itu bukan program Pemprov. Karena kami dilatih bertanggung jawab. Dan selesai. Insya Allah selesai," ujar Ganjar.

Menurut Ganjar, penuntasan kasus Wadas mengedepankan dialog dengan warga.

"Dialog, menurut saya, menjadi sesuatu yang penting agar seluruh kekuatan yang ada di sana, agar seluruh kelompok yang ada di sana bisa duduk bersama untuk

menyelesaikan persoalan," tutur Ganjar.

Selama proses tersebut, Ganjar yang saat ini masih menjadi gubernur tak segan mendatangi warga Desa Wadas. Dia juga memohon maaf kepada warga dan mengajak mereka mencari penyelesaian yang mengedepankan musyawarah mufakat.

"Tidak usah saling menyakiti hati perasaan warga, diajak rebung semua. Nanti panjenengan yang sudah mendapat ganti rugi, uangnya jangan dipakai sembarangan, untuk beli tanah atau rumah pengganti," kata Ganjar kepada warga Wadas.

Sedangkan Mahfud menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran HAM dalam penanganan konflik Wadas.

"Laporan Komnas HAM yang resmi, tertulis, dan diumumkan ke publik dengan tegas menyebutkan Wadas itu tidak ada pelanggaran HAM," kata Mahfud, Sabtu.

Menurut Mahfud, Komnas HAM telah menyatakan bahwa semua prosedur terkait proyek di Wadas telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Ganjar mengaku bersyukur bahwa persoalan terkait dua PSN itu tuntas selama masa jabatannya sebagai gubernur yang adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.

Dia pun mengingatkan bahwa ada sejumlah kebijakan yang dibuat dalam dua periode kepemimpinan di Jawa Tengah yang pro-lingkungan, sekalipun jarang sekali diekspose.

Sebagai contoh keputusan pro-lingkungan yang dia maksud itu, Ganjar menyebutkan proyek pembangunan pabrik semen di Kebumen dan tambang emas di Wonogiri yang bukan PSN.

"Ditolak karena tidak memenuhi persyaratan lingkungan," ujar Ganjar. ● han

TKN Sebut 3 Skenario Hitam untuk Jegal Prabowo-Gibran

JAKARTA (IM) - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menyebutkan, ada tiga skenario hitam untuk menjegal pasangannya calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Menurut Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhan, pejejalan dilakukan dengan cara-cara yang ilegal, terstruktur, sistematis, dan masif.

"Motif penjejalan itu karena meroketnya elektabilitas Prabowo-Gibran yang bisa jadi membuat sebagian orang frustrasi. Prabowo-Gibran selalu unggul telak di semua lembaga survei terpercaya, baik dalam simulasi tiga pasion ataupun dengan simulasi dua pasion jika terjadi dua putaran," kata Habiburokhan dalam keterangannya kepada awak media di Media Center TKN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (21/1).

Skenario kecurangan pertama, sebut Habiburokhan, dengan menggunakan kekuasaan kepala daerah atau kementerian/lembaga yang pejabatnya berafiliasi kepada partai politik tertentu.

"Fenomena ini terjadi di berbagai provinsi di seluruh

Indonesia. Contohnya antara lain adanya dugaan penggunaan APBD Kota Semarang untuk pengadaan motor warna merah yang identik dengan warna parpol tertentu," ucap Habiburokhan.

Diduga ada mobilisasi Dharma Wanita untuk menghadiri senam bersama istri salah satu capres di Sulawesi Utara pada Rabu (17/1) lalu.

"Dan dugaan dimanfaatkannya Petugas Pendamping Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menjadi tim pemenangan salah satu paslon," kata Habiburokhan.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, jika Tim Petugas Pendamping Desa tersebut menolak mendukung paslon tersebut, SK tidak diperpanjang. "Terakhir, kita juga dikejutkan dengan beredarnya surat suara yang sudah tercablos salah satu paslon di Taiwan," kata Habiburokhan.

"Terkait dugaan kecurangan ini, sejauh ini kami sudah melaporkan 41 laporan ke Bawaslu, dua laporan ke Dewan Pers dan Komisi Penyelesaian sengketa Pemilu, 5 laporan ke DKPP serta 5 laporan pidana. Kami juga sedang menginventarisasi puluhan dugaan kecurangan lainnya,"



IDN/ANTARA

KAMPANYE PRABOWO DI MAJALENGKA

Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa pendukungnya saat kampanye di lapangan Jatipamora, Majalengka, Jabar, Minggu (21/1). Dalam kampanyenya, Prabowo menyampaikan visi, misi, dan program kerja dan berjanji akan menghapus kemiskinan serta melanjutkan kebijakan hilirisasi Presiden Jokowi.

ujarnya menambahkan.

Skenario kedua adalah isu pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Habiburokhan mengatakan, pelaku adalah mengembuskan isu pemakzulan membangun narasi sesat bahwa Jokowi layak dimakzulkan, tetapi tidak mampu memberikan bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.

"Presiden Jokowi jelas tidak pernah melakukan pelanggaran hukum apapun dan tidak ada satupun syarat menjadi Presiden yang tidak lagi dipenuhi oleh Presiden Jokowi," kata Habiburokhan.

Skenario ketiga yaitu produksi berita bohong dan fitnah. Habiburokhan mencontohkan beredarnya koran Achtung yang memfitnah

Prabowo sebagai penculik 13

aktivis pada peristiwa 1998. Habiburokhan mengatakan, ia juga telah melaporkan koran Achtung ke polisi. "Kami meminta kepada penegak hukum terkait, baik Bawaslu, DKPP dan Kepolisian agar melakukan tugasnya dengan baik menangkal tiga skenario hitam di atas," katanya. ● han



IDN/ANTARA

KAMPANYE AKBAR PERDANA ANIES BASWEDAN

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan orasi politiknya di hadapan pendukungnya saat kampanye akbar di Pinang, Tangerang, Banten, Minggu (21/1). Pasangan Anies – Muhaimin menjadikan Tangerang Raya sebagai wilayah perdananya menggelar kampanye akbar pilpres 2024.

Anies Janjikan Bangun 11 Stadion dan Berikan Jaminan Hari Tua bagi Atlet

JAKARTA (IM) - Calon Presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan saat berdialog dengan sejumlah tokoh legenda sepak bola Indonesia, menyampaikan visi dan misinya terkait pengembangan olahraga di Indonesia, khususnya sepak bola. Sebab, baginya, olahraga adalah salah satu bidang yang dapat menyatukan berbagai lapisan masyarakat dan suku bangsa di Tanah Air.

"Barusan ngobrol di acara Umpan Manies dengan para legenda sepak bola yang hadir dan kami berbicara banyak hal terkait sepak bola. Olahraga itu unik karena mempersatukan semua lintas strata ekonomi dan suku bangsa," kata Anies dalam siaran, Minggu (21/1).

Pada acara dialog "Umpan Manies" di Rooftop Springhill, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (20/1). Salah satu rencana Anies yang mendapat sorotan adalah pembangunan 11 stadion bertaraf internasional di 11 kota di seluruh Indonesia.

"Kami ingin olahraga di Indonesia bertumbuh dan berkembang dengan baik, termasuk sepak bola. Salah satu yang kami rencanakan adalah membangun stadion internasional di 11 kota atau kabupaten yang harapannya bisa menjadi pemantik untuk menumbuhkan ekosistem

sepak bola yang sehat," ujar Anies.

Selain stadion, Anies juga berencana untuk membangun lapangan latihan yang memiliki standar FIFA, dengan menggunakan rumput buatan yang tahan lama dan mudah dirawat. Ia berharap, sarana tersebut bisa melatih dan melahirkan para atlet muda yang berpotensi sehingga menghasilkan tim nasional yang berprestasi.

Anies juga tidak melupakan para atlet senior yang telah berjasa bagi Indonesia. Ia pun menjanjikan bahwa negara akan memberikan jaminan hari tua bagi mereka, mulai dari pemberian tempat

tinggal layak, jaminan bulanan yang cukup, hingga jaminan kesehatan.

"Jadi, salah satu yang kami rencanakan adalah memberikan jaminan hari tua bagi para atlet yang pernah membawa nama Indonesia di gelanggang internasional di semua kompetisi. Kami pastikan mereka tinggal di tempat yang baik, punya jaminan bulanan yang baik, jaminan kesehatan untuk hari tua," papar Anies.

Tak hanya itu, Anies juga ingin membangun *hall of fame* bagi atlet berprestasi nasional yang diharapkan dapat menjadi sumber motivasi dan edukasi bagi para atlet muda dan masyarakat luas. ● mei